



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI JAMBI**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKj Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan masyarakat secara keseluruhan.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Jambi, Januari 2026

**Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Jambi**



**ASRAF, S.Pt, M.Si**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 19661120 199403 1 006**



## Ikhtisar Eksekutif

Tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKJ) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi tahun 2025 adalah sebagai pertanggung-jawaban kinerja Dinas selama tahun 2025, dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan dalam Perda No. 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi yang dihasilkan Tahun 2025, dapat digambarkan sebagai berikut : Dari indikator kinerja utama SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025, menunjukkan bahwa capaian pada IKU telah mendekati target yang ditetapkan. Capaian kinerja IKU sebagai berikut :

- a. Sasaran meningkatnya produksi perikanan, indikator sarasannya adalah jumlah produksi perikanan yang merupakan kumulatif dari jumlah produksi perikanan tangkap dan jumlah produksi perikanan budidaya. Capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi untuk indikator Jumlah produksi perikanan pada Tahun 2025 adalah sebesar 82%.
- b. Sasaran meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan, terdapat 2 indikator sasaran yaitu: 1) Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha) dengan capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi pada tahun 2025 adalah sebesar 0,00%; 2) Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap

peraturan perundang-undangan dengan capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi pada tahun 2025 adalah sebesar 100%.

- c. Sasaran meningkatnya angka konsumsi ikan, dengan indikatornya Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun), capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025 adalah sebesar 98,29%.
- d. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik, terdapat 2 (dua) indikator sasaran yaitu: 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi pada tahun 2025 adalah sebesar 101,0%, dan; 2) Predikat Akuntabilitas Kinerja (Nilai AKIP) dengan capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025 adalah sebesar 77,2%

Selanjutnya untuk mencapai sasaran strategik tersebut diimplementasikan melalui 6 (enam) program dan 18 (delapan belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub-kegiatan. Pada awal penyusunan Anggaran biaya untuk mengimplementasikan 6 program tersebut sebesar Rp 33.996.143.510,- (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus sepuluh rupiah), dan menjadi Rp 27.330.646.832 (dua puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) mengikuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, lalu pada APBD perubahan menjadi Rp 27.615.646.832,- (dua puluh tujuh milyar enam ratus lima belas juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa hasil capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi selama tahun 2025 telah memenuhi seluruh sasaran strategik yang ditargetkan. Secara umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi telah dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan yaitu: 1) Meningkatkan produksi perikanan; 2) Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan; 3) Meningkatkan angka konsumsi ikan, dan; 4) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik.

Capaian kinerja tersebut di atas baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil, menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis atas capaian kinerja tahun

2025 dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan Rencana Kinerja Tahun 2026, yaitu sebagai berikut :

1. Selalu konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi terutama dengan dinas yang membidangi perikanan ditingkat Kabupaten/Kota dalam upaya penyelarasan program kegiatan guna tercapainya sasaran kelautan dan perikanan yang sudah ditetapkan .
2. Meningkatkan kinerja pengelolaan program dan kegiatan dengan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran strategik yang ditetapkan. Hal ini secara khusus akan difokuskan pada sasaran-sasaran strategik yang capaian kinerjanya masih berada di bawah target yang ditetapkan.
3. Menciptakan inovasi di bidang kelautan dan perikanan guna mengatasi permasalahan yang dihadapi terutama permasalahan pakan ikan serta dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai dasar bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>IKTISAR EKSEKUTIF</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>vii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Struktur Organisasi	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.3 Isu-isu Strategis	4
1.4 Keadaan Pegawai	5
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana	8
1.6 Keuangan	9
1.7 Sistematika Laporan	10
<b>II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	<b>12</b>
2.1 Perencanaan Strategis	12
2.2 Perjanjian Kinerja	15
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025	16
<b>III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>19</b>
3.1 Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025	19
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	21
3.3 Realisasi Anggaran	39
<b>IV. PENUTUP</b>	<b>44</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1.1	Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025	9
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Perencanaan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023-2026	12
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi serta Program yang mendukung	13
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	16
Tabel 2.4	Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi	17
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kerja	18
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025	19
Tabel 3.3	Capaian realisasi kinerja meningkatnya produksi perikanan	20
Tabel 3.4.	Realisasi Kinerja pencapaian sasaran Meningkatkan Produksi Perikanan Tahun 2025 serta Tahun 2023 dan Tahun 2024	21
Tabel 3.5	Capaian Kinerja sasaran meningkatnya produksi perikanan s.d Jangka Menengah Daerah	22
Tabel 3.6	Capaian Realisasi Kinerja Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan Tahun 2025	25
Tabel 3.7	Capaian Kinerja sasaran meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan s.d Jangka Menengah Daerah	27
Tabel 3.8	Capaian Realisasi Kinerja Meningkatkan Pelaku Usaha Perikanan Tahun 2025	30
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Meningkatkan Pelaku Usaha s.d Jangka Menengah Daerah	30
Tabel 3.10	Capaian Realisasi Kinerja Meningkatkan angka konsumsi ikan Tahun 2025	31
Tabel 3.11	Realisasi Kinerja pencapaian sasaran Meningkatkan Angka konsumsi ikan Tahun 2025 serta Tahun 2023 dan Tahun 2024	32
Tabel 3.12	Capaian Kinerja sasaran meningkatnya angka konsumsi ikan s.d Jangka Menengah Daerah	33
Tabel 3.13	Capaian Realisasi Kinerja Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2025	34
Tabel 3.14	Realisasi Kinerja pencapaian sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2025 serta Tahun 2023 dan Tahun 2024	34
Tabel 3.15	Capaian Kinerja sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik s.d Jangka	35

Tabel 3.16	Menengah Daerah Anggaran dan Realisasi Per Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025	37
Tabel 3.17	Analisis efisiensi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025	38

## DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi	2
Gambar 1.2	Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Jabatan Pejabat Struktural Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025	7
Gambar 1.3	Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi	7
Gambar 1.4	Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025	7
Gambar 1.5	Diagram Profil Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi	8
Gambar 3.1	Perbandingan realisasi produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya	21
Gambar 3.2	Perbandingan realisasi persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	26
Gambar 3.3	Perbandingan realisasi angka konsumsi ikan	32
Gambar 3.5	Perbandingan realisasi Nilai SAKIP tahun 2023-2024	35

## I PENDAHULUAN

### 1.1. Struktur Organisasi

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 14 tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Jambi. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi sebelumnya bernama Dinas Perikanan Provinsi Jambi, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 13 Tahun 1996 tanggal 18 November 1996 tentang Struktur Organisasi Dinas Perikanan Provinsi Jambi.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang kelautan dan perikanan di Provinsi Jambi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi**

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi



## 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 51 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.

Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 51 Tahun 2016 adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang kelautan dan perikanan lingkup Provinsi dan kabupaten/kota;
- d. Pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan, pengelolaan ruang laut dan perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengembangan teknologi perikanan, pengawasan dan penguatan daya saing produk;
- e. Perumusan Kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut diluar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan diwilayah laut, dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan;
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.3. Isu-isu Strategis

Dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan terdapat hambatan dan permasalahan serta isu strategis yang secara langsung dan tidak

langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan dan pencapaian kinerja.

Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun internal. Isu strategis yang berkembang pada pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi antara lain sebagai berikut :

1. Masih rendahnya produktivitas perikanan tangkap, budidaya serta pengolahan hasil kelautan dan perikanan,
2. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang belum ramah lingkungan,
3. Biaya produksi nelayan, pembudidaya dan unit pengolahan ikan relatif masih tinggi,
4. Masih rendahnya sumberdaya manusia pelaku usaha kelautan dan perikanan,
5. Masih rendahnya produksi dan mutu produk hasil kelautan dan perikanan.

#### **1.4. Keadaan Pegawai**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 51 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal Pada Dinas Kelautan dan Perikanan, serta, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Penerapan Mutu Hasil Perikanan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan dibantu oleh 1 orang Sekretaris dan 3 orang Kepala Bidang dan 2 Orang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, dengan rincian sebagai berikut :

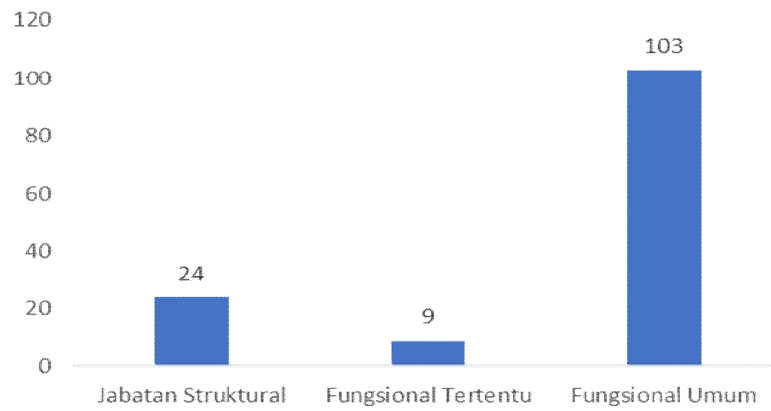
- a. Sekretaris, membawahi :
  - Sub Bagian Program,Kepegawaian dan pelaporan
  - Sub Bagian Umum, Keuangan dan Aset

- b. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :
  - Seksi Perbenihan dan produksi
  - Seksi Kesehatan ikan, lingkungan dan kawasan perikanan budidaya
  - Seksi Pakan dan teknologi perikanan budidaya
- c. Bidang Pengelolaan ruang laut dan Perikanan Tangkap, membawahi :
  - Seksi Kenelayanan dan usaha perikanan tangkap
  - Seksi Konservasi dan sumberdaya ikan
  - Seksi Kepelabuhan dan pengelolaan ruang laut
- d. Bidang pengawasan dan penguatan daya saing produk, membawahi:
  - Seksi Pengawasan
  - Seksi Pengolahan dan bina mutu
  - Seksi pemasaran, promosi dan investasi
- e. UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal, membawahi :
  - Subbag Tata usaha
  - Seksi Kesyahbandaran
  - Seksi Pelayanan Usaha Perikanan
- f. UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
  - Subbag TU
  - Seksi Penerapan Mutu
  - Seksi Pelayanan dan Pengujian Mutu

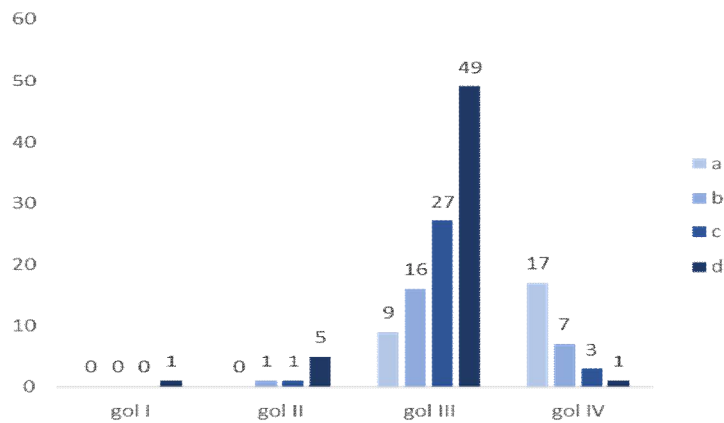
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi diperlukan sumberdaya manusia yang kompeten dan berkualitas. Kondisi sumberdaya manusia di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2025, tercatat sebanyak 138 pegawai yang terdiri dari 23 pejabat struktural, 10 pejabat fungsional tertentu, dan 105 fungsional umum.

Profil Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi disajikan dalam gambar berikut :

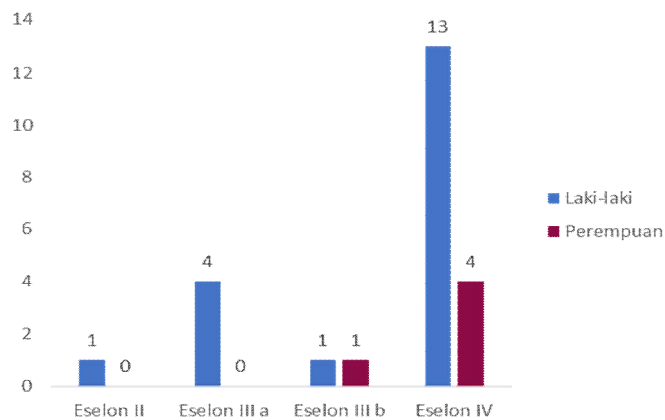
**Gambar 1.2. Diagram Profil Kepegawaian Berdasarkan Jabatan Pejabat Struktural Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025 (Jumlah Orang)**



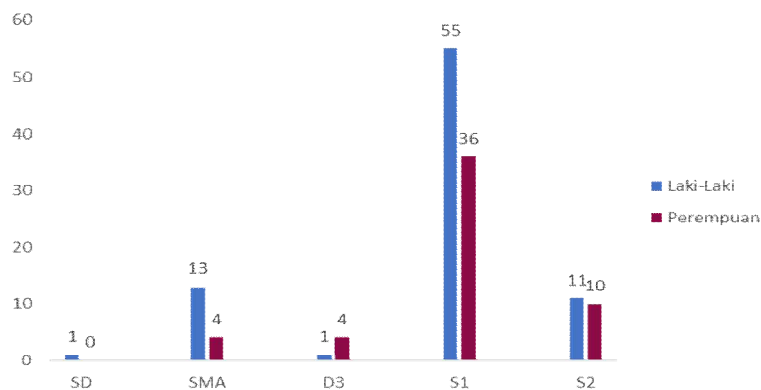
**Gambar 1.3. Diagram Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan Ruang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi tahun 2025 (Jumlah Orang)**



**Gambar 1.4. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025 (Jumlah Orang)**



**Gambar 1.5 Diagram Profil Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi (Jumlah Orang)**



### 1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana dan prasarana di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini asset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Dinas kelautan dan perikanan Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.1 Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025**

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan/Kondisi
1	Alat-alat besar	1	Baik
2	Alat-alat angkutan	67	Baik
3	Alat bengkel dan alat ukur	55	Baik
4	Alat pertanian	221	Baik
5	Alat kantor dan rumah tangga	1.075	Baik
6	Alat Studio dan alat komunikasi	92	Baik
7	Alat kedokteran dan kesehatan	16	Baik
8	Alat Laboratorium	34	Baik
9	Alat Persenjataan	10	Baik
10	Komputer	208	Baik
11	Bangunan gedung	206	Baik
12	Jaringan	161	Baik
13	Aset lainnya	67	Baik

Sarana dan parasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

## **1.6 Keuangan**

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi pada tahun 2025 berasal dari APBD Daerah Provinsi Jambi. Pada tahun 2025 anggaran Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 33.996.143.510,- (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus sepuluh rupiah) dan pada APBD perubahan menjadi Rp 27.615.646.832,- (dua puluh tujuh milyar enam ratus lima belas juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) atau berkurang sebesar 23,10% atau sebesar Rp. 6.380.496.678,- (enam milyar tiga ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan rincian belanja operasional sebesar Rp. 27.603.900.832,- (dua puluh tujuh milyar enam ratus tiga juta sembilan ratus ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) dan belanja modal sebesar Rp. 11.746.000,- (sebelas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja langsung dan tidak langsung yang berasal dari APBD sebesar Rp 27.615.646.832,- (dua puluh tujuh milyar enam ratus lima belas juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) untuk mendanai 6 (enam) program dan 13 (tiga belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan termasuk rutin.

Adapun realisasi Anggaran Tahun 2025 per 31 Desember sebesar Rp 25.916.225.479,- (dua puluh lima milyar Sembilan ratus enam belas juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) atau sebesar 93,85%.

## 1.7 Sistematika Laporan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat :

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKJIP/manfaat LKJIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi serta potensi yang menjadi ruang lingkup perangkat daerah dan sistematika penulisan LKJIP.

### BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu

yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas.

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

#### **LAMPIRAN**

## II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1. Perencanaan Strategis

Berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi telah menyusun Perencanaan stratejik yang merupakan suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Sehubungan dengan tahun 2025 merupakan masa transisi periode perencanaan berupa penetapan Rensta 2025-2029, maka terdapat penyesuaian yang diakomodir dalam penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025. Laporan Kinerja Perangkat Daerah tahun 2025 disusun untuk menjawab Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra 2021-2026 yang digunakan selama masa transisi.

Dengan mempertimbangkan potensi lahan dan kondisi yang dimiliki saat ini dan harapan yang akan diwujudkan pada masa yang akan datang maka rumusan tujuan, sasaran dan program kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Perencanaan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja pada Tahun				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,65	79,85	80,35	81,75	82
			2. Prediket Akuntabilitas Kinerja (Nilai 0-100)	75 (BB)	80 (A)	85 (A)	90 (AA)	95 (AA)
2	Meningkatkan produksi perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	3. Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	111.648,90	113.804,80	116.021,70	118.300,50	120.643,90
3	Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.	Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	4. Jumlah Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha)	10.687,49	16.400,53	112.13,36	5.833,19	5.696,36
			5. Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	60%	65%	70%	75%	77%
4	Meningkatkan angka konsumsi ikan	Meningkatnya angka konsumsi ikan	6. Nilai Angka Konsumsi Ikan (AKI) Daerah (Kg/Kapita/Tahun)	40,6	41	41,5	42	42,5

Pada tahun 2025 merupakan tahun penyusunan dokumen perencanaan Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan tahun transisi, berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029, dimana tahun 2025 merupakan tahun awal penetapan, dimana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi telah menetapkan tujuan, sasaran dan Indikator menyesuaikan dengan Imendagri No 2 tahun 2025.

### 2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Sesuai dengan Visi dan Misi serta permasalahan daerah dalam bidang kelautan dan perikanan maka tujuan jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi selama 5 tahun anggaran yang mengacu pada Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik.
2. Meningkatkan Produksi Perikanan.

3. Meningkatkan Kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
4. Meningkatkan Angka Konsumsi Ikan.

Tujuan–tujuan tersebut diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan dengan program-program yang ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi serta Program yang mendukung**

<b>Tujuan 1:</b> Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	
<b>Sasaran</b>	<b>Program</b>
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
<b>Tujuan 2:</b> Meningkatkan produksi perikanan	
<b>Sasaran</b>	<b>Program</b>
Meningkatnya produksi perikanan	1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
<b>Tujuan 3:</b> Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.	
<b>Sasaran</b>	<b>Program</b>
Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	1. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 2. Program Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
<b>Tujuan 4:</b> Meningkatkan angka konsumsi ikan	
<b>Sasaran</b>	<b>Program</b>
Meningkatnya angka konsumsi ikan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Berdasarkan tabel tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi memiliki 5 sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Produksi Perikanan
3. Meningkatnya Kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
4. Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan

Pada tahun 2025 yang merupakan tahun transisi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi telah menetapkan tujuan berdasarkan Imendagri Nomor 2 Tahun 2025, dimana Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi. Berdasarkan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi mendukung dua misi, yaitu Misi Pertama, yaitu **“Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien”**, dengan tujuan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, adaptif dan demokratis. Indikator tujuan RPJMD dari Misi pertama ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi dan misi ketiga, yaitu **“Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumber Daya Manusia”**, dengan tujuan Terwujudnya sistem perekonomian yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial. Indikator tujuan RPJMD dari misi ketiga ini adalah Indeks Ekonomi Biru, sedangkan Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi adalah **“Terwujudnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan”**.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Gubernur Jambi dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 secara detail dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 2.3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Gubernur Jambi dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029**

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD
Terwujudnya JAM BIMAju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di bawah Ridho ALLAH SWT	Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Terwujudnya sistem perekonomian yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial	Indeks Ekonomi Biru	Meningkatnya pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat	Peran sektor perikanan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)(%)	Terwujudnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	1. Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Nilai)	Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	1. Produktivitas Perikanan Tangkap (Ton/Trip/Tahun)
					Rata-rata konsumsi kalori ikan per kapita (puluh kkal) per hari		2. Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan (NTPi) (Nilai)		2. Produktivitas Perikanan Budidaya (Ton/Unit Kolam/Tahun)
					Persentase Penduduk miskin ekstrim di wilayah Pesisir (%)				

Program kerja Dinas kelautan dan perikanan Provinsi Jambi pada tahun 2025 mengacu kepada Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Jambi Tahun 2025-2026 , akan tetapi ada perbedaan sasaran dan indikator antara RENSTRA 2021-2026 dan RENSTRA 2025-2026, dimana pada RENSTRA 2025-2029 sasaran dan indikator program telah ditetapkan berdasarkan Imendagri Nomor 2 Tahun 2025 sedangkan pada RENSTRA 2021-2026 sasaran dan indikator program belum ditetapkan.

Dengan menggariskan beberapa Program dan Kegiatan dalam rangka Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi yang sesuai Permendagri No.90 Tahun 2019 meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
5. Program Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

## **2.2. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Pada tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi telah menyusun Penetapan Kinerja sebagai proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik.

Indikator kinerja yang menggambarkan pencapaian sasaran-sasaran tersebut disepakati sebagaimana diuraikan berikut.

1. Meningkatnya produksi perikanan, dengan indikator sasaran jumlah produksi perikanan (ton).
2. Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan dengan 2 (dua) indikator sasaran yaitu: 1) Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (Ha); 2) Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Meningkatnya angka konsumsi ikan dengan indikator sasaran Nilai angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun).
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik, dengan 2 (dua) indikator sasaran yaitu: 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); 2) Predikat Akuntabilitas Kinerja (Nilai AKIP)

Untuk lebih jelasnya Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 (mengacu pada Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026) dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

**Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (mengacu pada RENSTRA Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026)**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (ton)	118.300,50
2	Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha)	5.833,19
		Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang undangan	75%
3	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	42
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,75

Perjanjian Kinerja seperti yang tertera pada Tabel 2.4 disusun pada awal tahun 2025 dimana pada awal tahun 2025, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi tahun 2025-2029 belum ditetapkan dan pada saat Imendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan menyesuaikan dengan Imendagri tersebut, ada perubahan indikator kinerja. Adapun perubahan indikator kinerja dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2.5 Tujuan dan Sasaran Perencanaan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (Tahun 2024)	2025	Target Kinerja pada Tahun					Kondisi Akhir
							2026	2027	2028	2029	2030	
1	Terwujudnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Nilai)			99,32	100,26	101,85	102,15	102,92	103,45	103,89	103,89
		Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPI) (Nilai)			101,94	102,15	102,38	103,75	103,98	104,25	104,65	104,65
		Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Produktivitas Perikanan Tangkap (Ton/Trip/Tahun)	169,15	169,66	170,16	170,67	171,18	171,70	172,21	172,21	
			Produktivitas Perikanan Budidaya (Ton/Unit Kolam/Tahun)	89,85	92,28	92,54	96,24	100,09	105,09	110,35	110,35	

### 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni yang bersumber dari APBD, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 33.996.143.510,- (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus sepuluh rupiah) dengan rincian belanja operasional sebesar sebesar Rp. 33.991.124.660 (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah) dan belanja modal sebesar Rp. 5.018.850,- (lima juta delapan belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Pada awal tahun 2025, adanya kebijakan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Oleh karena itu anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025 untuk mengikuti Inpres tersebut terjadi efisiensi sebesar 24,39% atau sebesar Rp. 6.665.496.678,- (enam milyar enam ratus enam puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tujuh delapan rupiah) menjadi sebesar Rp. 27.330.646.832 (dua puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).

Pada APBD Perubahan tahun 2025 terdapat penambahan anggaran sebesar 1,04% atau sebesar Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) menjadi 27.615.646.832,- (dua puluh tujuh milyar enam ratus lima belas juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).

### 2.3.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi yang bersumber dari APBD murni yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi**

No.	Sasaran Strategis	Anggaran	Prosen-tase	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya produksi perikanan	Rp 3.397.969.944,-	12,30%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</li> <li>• Program Pengelolaan Perikanan budidaya</li> </ul>
2.	Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Rp 1.239.335.300,-	4,48%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</li> <li>• Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</li> </ul>
3.	Meningkatnya Konsumsi Ikan Masyarakat	Rp 672.561.220,-	32,43%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</li> </ul>
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Rp 22.305.780.368,-	80,77%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi</li> </ul>
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 27.615.646.832,-</b>	<b>100%</b>	

### III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara, membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2025, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 dengan target jangka menengah yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar Nasional (jika ada), melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, melakukan analisis atas efektifitas penggunaan sumberdaya pendukung kinerja, melakukan analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.

### 3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria/ Kode warna
1.	Meningkatnya produksi	Jumlah Produksi Perikanan (ton)	118.300,5	96.819,2	81,8	Tinggi
2.	Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha)	5.833,19	0	0	Sangat Rendah
		Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	75%	66,87%	89,2	Tinggi
3.	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	42,00	41,8	99,5	Sangat Baik
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,75	82,584	101,0	Sangat Baik
		Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	AA (90,00)	BB 79,15	87,9	Tinggi

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi memiliki 6 (enam) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian 4 (empat) sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi. Pada tahun 2025, indikator sasaran tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan dari total indikator dengan rata-rata persentase capaian sasaran sebesar 80,09%.

### 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pada tahun 2025, capaian kinerja secara menyeluruh dari seluruh indikator Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi rata-rata mencapai kinerja sebesar 80,09%. Secara detail capaian kinerja tersebut dapat

dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir dan dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut :

### Sasaran #1 Meningkatnya Produksi Perikanan

Sasaran ini dicapai dengan indikator sasaran yaitu Jumlah Produksi Perikanan (ton) yang berasal dari Produksi Perikanan Tangkap (ton), dan Produksi Perikanan Budidaya (ton). Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton) dicapai melalui program pengelolaan perikanan tangkap yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- Pengelolaan Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 mil
- Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi

Sedangkan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton) dicapai melalui program pengelolaan perikanan budidaya yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- Pembudidayaan Ikan di Laut
- Pembudidayaan ikan di perairan darat

Adapun pencapaian sasaran ini secara detail dijelaskan pada tabel 3.3 berikut :

**Tabel 3.3 Capaian Realisasi Kinerja Meningkatnya Produksi Perikanan Tahun 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi*	% Capaian
1.	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)</li> <li>• Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)</li> </ul>	118.300,5	96.819,2 46.829,2 49.990	81,8

A  
\* Angka Sementara

Untuk indikator jumlah produksi perikanan dengan target indikator di tahun 2025 sebesar 118.300,5 ton telah terealisasi sebesar 96.819,2 ton dengan capaian sebesar 81,8%. Indikator Jumlah Produksi Perikanan ini merupakan jumlah dari jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 46.829,2 ton

dan jumlah produksi perikanan budidaya sebesar 49.990 ton. Meskipun capaian pada indikator ini tergolong “tinggi” namun dapat dikatakan untuk indikator jumlah produksi perikanan, capaian tahun 2025 belum optimal dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

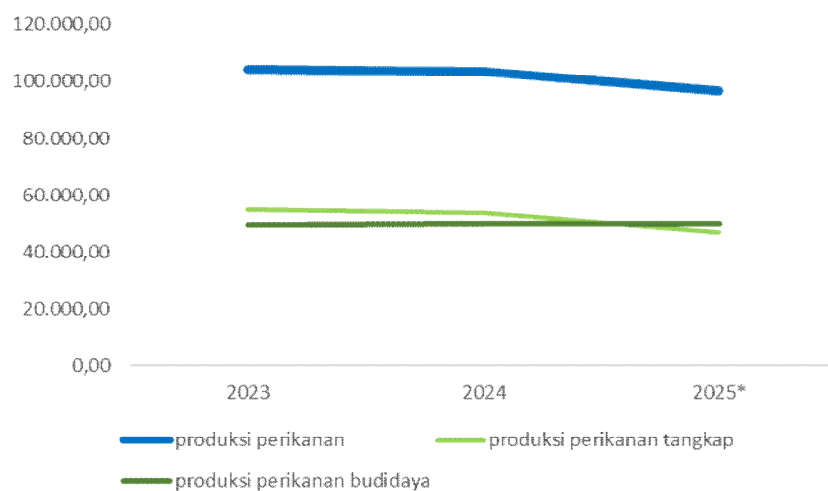
**Tabel 3.4. Realisasi Kinerja pencapaian sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan Tahun 2025 serta Tahun 2023 dan Tahun 2024**

No	Indikator	Realisasi		Realisasi		
		2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025*	% capaian
1	<b>Jumlah Produksi Perikanan</b>	<b>104.356,4</b>	<b>103.667,8</b>	<b>118.300,5</b>	<b>96.815,2</b>	<b>81,8</b>
	• Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	54.807,5	53.721,1		46.829,2	
	• Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	49.548,9	49.956,7		49.990	

\*Angka sementara

Jumlah produksi perikanan pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 6,6% jika dibandingkan tahun tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan baik jumlah perikanan tangkap maupun perikanan budidaya mengalami penurunan. Untuk lebih jelasnya perbandingan realisasi jumlah produksi perikanan tangkap dan jumlah produksi perikanan budidaya dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut :

**Gambar 3.1 Perbandingan realisasi produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya**



Dapat dilihat pada gambar 3.1 jumlah produksi perikanan baik produksi perikanan tangkap maupun produksi perikanan budidaya tergolong cukup landai

dan tidak terdapat perubahan yang cukup signifikan selama 3 (tiga) tahun, namun dapat dilihat dari gambar 3.1 dapat dikatakan Sebagian penyebab turunnya jumlah produksi perikanan ini dikarenakan turunnya jumlah produksi perikanan tangkap. Pada 3 (tiga) tahun terakhir jumlah produksi perikanan tangkap mengalami sedikit penurunan, dengan rata-rata penurunan sebesar 7,4% dengan penurunan yang signifikan pada tahun 2025 yaitu menurun sebesar 12,8% dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan pada jumlah produksi perikanan budidaya meskipun tidak terlalu signifikan mengalami peningkatan yang cukup stabil selama tiga tahun terakhir sebesar 0,4% sehingga di tahun 2025 terealisasi melebihi 2 (dua) tahun terakhir.

Jika dilihat perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.5 Capaian Kinerja sasaran meningkatnya produksi perikanan s.d Jangka Menengah Daerah**

No.	Indikator	Capaian Awal RPJMD 2021	Capaian 2024	Capaian 2025*	Target 2026	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026
1.	Jumlah Produksi Perikanan (ton)	104.286,3	103.677,8	96.815,2	120.643,9	80,2%
	• Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	54.857,3	53.721,1	46.829,2	55.800,3	83,9%
	• Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	49.428,9	49.956,7	49.990	64.843,6	77,1%

\*Angka Sementara

Pada indikator jumlah produksi perikanan jika dilihat capaian pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan target tahun 2026 telah tercapai sebesar 80,2%, pada tahun 2026 diharapkan akan memenuhi target yang telah ditetapkan.

Adapun jika dibandingkan realisasi capaian dengan target Nasional pada Indikator Produksi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Provinsi Jambi dengan Target Nasional**

Indikator	Capaian Nasional 2025**	Capaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi		
		Target	Realisasi*	%Capaian
<b>Jumlah Produksi Perikanan (ton)</b>	11,52 juta	118.300,5 ton	96.819,2	81,8
• Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	6,5 ton		46.829,2	
• Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	5,02 ton		49.990	

\*Angka Sementara

\*\*Angka Triwulan III

Jika dilihat pada tabel tersebut jumlah produksi perikanan tangkap Provinsi Jambi di tahun 2025 berkontribusi terhadap jumlah produksi perikanan tangkap Nasional sebesar 0,8% jika dibandingkan dengan capaian Nasional..

Sumberdaya pendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya produksi perikanan (produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya) adalah anggaran APBD/APBN pada program pengelolaan perikanan tangkap dan pengelolaan perikanan budaya . Pada produksi perikanan tangkap sumberdaya pendukung kinerja tersebut dapat efektif dengan mengadakan kegiatan bimtek keterampilan nelayan, kegiatan pengawakan kapal perikanan dan perizinan. Kegiatan akan berhasil apabila ditunjang oleh adanya identifikasi kegiatan, rencana kegiatan yang akan dilaksanakan serta adanya monitoring dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Sedangkan sumberdaya pendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya produksi perikanan pada jumlah produksi perikanan budidaya adalah sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, sumberdaya alam, dan ketersediaan anggaran. Sumberdaya pendukung kinerja tersebut dapat efektif dengan mengadakan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, penyediaan sarana dan prasarana pembudidaya ikan yang efektif, dan penggunaan anggaran yang efisien.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya produksi perikanan pada jumlah produksi perikanan tangkap antara lain sebagai berikut :

- a. Bantuan alat tangkap dan kapal
- b. Bimtek keterampilan nelayan

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya produksi perikanan pada indikator jumlah produksi perikanan tangkap antara lain sebagai berikut :

- a. Sangat minimnya anggaran yang tersedia
- b. Harga BBM mahal.
- c. Alat tangkap yang sudah tidak layak untuk digunakan untuk penangkapan.
- d. Kurangnya kuota PIT (penangkapan ikan terukur) untuk Provinsi Jambi
- e. Banyaknya kapal yang tidak memiliki izin
- f. Aktivitas illegal PETI yang merusak ekosistem perairan darat

Alternatif solusi yang telah dilakukan selama tahun 2025 antara lain memberikan bantuan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan, mesin kapal, dan kapal yang jauh dari target dan belum mampu melaksanakan alternatif Solusi lain karena keterbatasan anggaran.

Pada sasaran meningkatnya produksi perikanan ini untuk jumlah produksi perikanan tangkap merupakan jumlah produksi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi baik tangkapan laut dan maupun perairan umum.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya produksi perikanan pada indikator jumlah produksi perikanan budidaya antara lain sebagai berikut :

- a. Adanya bantuan pemerintah
- b. Tingginya permintaan pasar
- c. Mudahnya akses informasi teknologi perikanan budidaya

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya produksi perikanan pada indikator jumlah produksi perikanan tangkap antara lain sebagai berikut :

- a. Meningkatnya harga pakan
- b. Alih fungsi lahan

Alternatif solusi yang telah dilakukan selama tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan pelatihan pembuatan pakan ikan mandiri

- b. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan
- c. Pembinaan dan pelatihan cara budidaya dan cara pembenihan ikan yang baik
- d. Pemberian bantuan benih dan pakan ikan serta sarana dan prasarana pembudidaya ikan

Pada sasaran meningkatnya produksi perikanan ini untuk indikator jumlah produksi perikanan budidaya merupakan jumlah produksi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi baik pembudidayaan jaring apung tawar, jaring tancap tawar, karamba, kolam air deras, kolam air tenang, minapadi dan tambak sederhana.

## **Sasaran #2 Meningkatnya Kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

Sasaran ini dicapai memiliki 2 (dua) indikator sasaran yaitu: (1) Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha); (2) Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan;. Indikator ke-1 yaitu Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha) dicapai melalui program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar Minyak dan Gas Bumi
- Sedangkan indikator ke-2 yaitu Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan dicapai melalui program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :
- Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil
  - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.7 Capaian Realisasi Kinerja Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan Tahun 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
2	Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan	5.883,19	0	0
		Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	75%	66,87%	89,2

Untuk indikator Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha) dengan target indikator sebesar 5.883,19 Ha terealisasi sebesar 0 Ha dengan capaian sebesar 0%. Hal ini disebabkan tidak adanya anggaran yang secara khusus diperuntukkan merealisasikan kegiatan. Indikator Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan dengan target di tahun 2025 sebesar 75% terealisasi sebesar 66,87% dengan capaian sebesar 89,2%. Sehingga dapat dikatakan bahwa capaian rata-rata untuk sasaran Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan adalah sebesar 44,6%.

Jika dilihat perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.8 Capaian Kinerja sasaran meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan s.d Jangka Menengah Daerah**

No.	Indikator	Capaian Awal RPJMD 2021	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025	Target 2026	Capaian s/d 20224 terhadap target 2026
2	Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha)	-	0	0	39.143,44	0
	Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	74,21%	70%	66,87%	77%	77%

\*Angka Sementara

Pada indikator Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha) jika dibandingkan dengan target 2025, target pada tahun 2026 akan tercapai apabila

adanya ketersediaan anggaran. Pada indikator Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan capaian di tahun 2025 jika dibandingkan dengan target tahun 2026 telah tercapai sebesar 86,8%. tercapainya pelaku usaha yang taat terhadap peraturan perundang-undangan karena sudah terlaksananya pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan meskipun belum optimal. Hal ini dikarenakan adanya penambahan Pengawas perikanan dan sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Sumberdaya pendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan pada indikator kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha) adalah adanya kepastian hukum Kawasan Konservasi Perairan Daratan (KKPD) yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan sumberdaya manusia, yang akan efektif jika adanya peningkatan sumberdaya manusia di bidang GIS. Sumberdaya pendukung pencapaian kinerja pada indikator persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan adalah ketersediaan anggaran APBD/APBN, kapal pengawas, PPNS, pengawas perikanan dan staf pengawasan serta keterlibatan aparat terkait dari dinas Kabupaten/Kota. Kegiatan Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan menjadi efektif jika didukung oleh pendukung kinerja yang saling bekerjasama.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan pada indikator kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha) antara lain integrasi RTRW dengan RZWP3K yang sedang dalam proses dan masih perlunya pendanaan yang cukup agar kegiatan dapat terlaksana. Pada indikator persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan antara lain adanya kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dan memperbanyak sosialisasi kepada pelaku usaha perikanan.

Faktor penghambat pada indikator kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha) selain alasan utama yaitu belum tersedianya anggaran untuk penetapan Kawasan konservasi adalah:

- a. Belum adanya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan, dan adanya keinginan masyarakat untuk ganti rugi alat tangkap nelayan
- a. Anggaran pelaksanaan konsultasi publik dan konsultasi teknis tidak tersedia, sehingga usulan penetapan kawasan konservasi tidak bisa diusulkan penetapannya dan Pelabuhan Ujung Jaung akan diserahkan ke Pusat sehingga pengelolaan akan diserahkan kepada pusat serta belum jelasnya kelanjutan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung penyerahan kawasan Pelabuhan Ujung Jabung ke Pemerintah Pusat
- Sarana prasarana pengawasan yang kurang memadai
- b. Kurangnya anggaran yang tersedia

Pada indikator persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

- a. Sarana Prasarana pengawasan yang kurang memadai dan,
- b. PPNS yang tidak tersedia
- c. Kurangnya anggaran yang tersedia untuk melakukan operasional pengawasan

Rencana tindak lanjut dan alternatif solusi yang telah dilakukan pada sasaran meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan selama tahun 2025 antara lain pada indikator kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha) antara telah dilaksanakannya FGD Rencana Penetapan Kawasan Konservasi dan Survey Biofisik dan Sosial Ekonomi di KKPD 04 Seberang Kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan luas 2.570,24, selesainya dokumen penyusunan rencana zonasi Kawasan konservasi perairan daerah perairan laut Seberang kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, telah mengusulkan baik di APBD Perubahan Tahun 2025 maupun APBD 2026 untuk penambahan anggaran untuk pelaksanaan konsultasi teknis, konsultasi publik serta penetapan wilayah, telah terbit SK Gubernur Jambi tentang Pokja Identifikasi dan Inventarisasi Penetapan Kawasan Konservasi serta SK Kepala Dinas tentang Tim Teknis Penetapan Kawasan Konservasi. Pada indikator persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan antara lain dengan adanya penambahan personil pengawas, PPNS, pelatihan dan Pendidikan untuk PPNS dan pengadaan sarana prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

### Sasaran #3 Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan

Sasaran ini dicapai melalui program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
- Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.11 Capaian Realisasi Kinerja Meningkatnya angka konsumsi ikan Tahun 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi*	% Capaian
4.	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	42,00	41,8	99,5

\*Angka sementara

Dari target Angka Konsumsi Ikan (AKI) di tahun 2025 sebesar 42,0 kg/kapita/tahun, capaian AKI 2025 yaitu 41,80 (AKI 2024) kg/kapita/tahun sehingga berdasarkan capaian tersebut tergolong sangat baik yakni 99,5%.

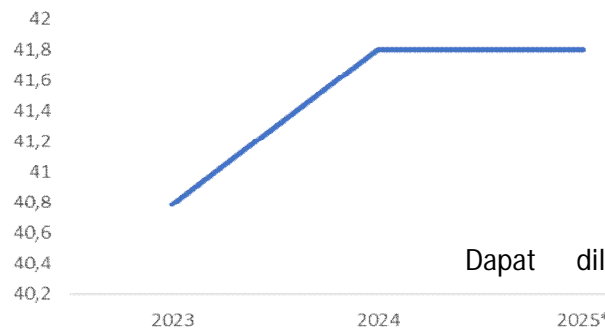
Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.12. Realisasi Kinerja pencapaian sasaran Meningkatnya Angka konsumsi ikan Tahun 2025 serta Tahun 2023 dan Tahun 2024**

No	Indikator	Realisasi		Realisasi 2025		
		2023	2024	Target	Realisasi*	% capaian
3	Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	40,79	41,8	42,00	41,8	99,5

\*Angka sementara

Untuk indikator pada sasaran ini pada tahun-tahun sebelumnya belum ditargetkan sehingga tidak dapat membandingkan capaian sehingga yang dibandingkan adalah realisasinya. Untuk lebih jelasnya perbandingan realisasi angka konsumsi ikan dapat dilihat pada gambar 3.3 berikut :

**Gambar 3.3 Perbandingan realisasi angka konsumsi ikan**

Dapat dilihat pada gambar tersebut

angka konsumsi ikan pada 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan yang konsisten walaupun tidak cukup signifikan.

Jika dilihat perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.13 Capaian Kinerja sasaran meningkatnya angka konsumsi ikan s.d Jangka Menengah Daerah**

No	Indikator	Capaian Awal RPJMD 2021	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025*	Target Tahun 2026	Capaian s/d 2022 terhadap target 2026
4.	Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	40,20	41,80	41,80	42,50	98,4

\*Angka Sementara

Dari target Angka Konsumsi Ikan (AKI) tahun 2026 sebesar 42,5 kg/kapita/tahun, dan capaian AKI 2025 yang masih berdasarkan angka capaian 2024 maka diprediksi capaian 2026 akan memenuhi angka target AKI tahun 2026 dengan didukung anggaran yang memadai dan sumberdaya kinerja.

Adapun jika dibandingkan realisasi capaian dengan target Nasional pada Indikator Produksi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi dengan Target Nasional**

Indikator	Capaian Nasional 2025**	Capaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025		
		Target	Realisasi*	Capaian
Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	58,76	42,00	41,80	99,5

\*Angka Sementara

\*\*capaian tahun 2024

Jika dilihat pada tabel tersebut Angka Konsumsi Ikan Provinsi Jambi di tahun 2025 jika dibandingkan terhadap realisasi Angka Konsumsi Ikan Nasional sebesar adalah sebesar 71,1% .

Sumberdaya pendukung pencapaian kinerja sasaran ini adalah anggaran APBD/APBN, Pembina mutu, analis pasar hasil perikanan, pengawas perikanan, jajaran pelaksana bidang pengawasan dan penguatan daya saing dan produk, dinas Kabupaten/Kota terkait serta instansi terkait lainnya. Kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan menjadi efektif apabila didukung oleh sumberdaya pendukung kinerja yang solid dan asling bekerja sama dengan baik.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini antara lain sebagai berikut :

- a. Minat masyarakat yang tinggi untuk mengkonsumsi ikan
- b. Ragam inovasi produk olahan guna peningkatan mutu dan keamanan pangan dalam peningkatan angka konsumsi ikan

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini antara lain rendahnya minat masyarakat dalam mengkonsumsi ikan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan selama tahun 2025 antara lain terus menggalakkan sosialisasi/kampanye GEMARIKAN ke daerah serta pelatihan/bimtek/demo pengolahan guna peningkatan skill pengolahan dan pemasaran ikan serta peningkatan mutu dan keamanan pangan dalam upaya peningkatan konsumsi ikan.

#### **Sasaran #5 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik**

Sasaran ini dicapai melalui program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Adapun pencapaian sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu (1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Predikat Akuntabilitas Kinerja (Nilai AKIP) dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.15 Capaian Realisasi Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi*	% Capaian
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,75	82,584	101,0
		Predikat Akuntabilitas Kinerja (Nilai AKIP)	90,00 (AA)	79,15	87,9

\*Angka Sementara

Terlihat pada tabel diatas, untuk sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tercapai 101% dan pada indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja (Nilai AKIP) tercapai 87,9 atau dapat dikatakan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik rata-rata tercapai 94,5%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja dan realisasi pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.16. Realisasi Kinerja pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2025 serta Tahun 2023 dan Tahun 2024**

No	Indikator	Capaian/ Realisasi		Capaian/ Realisasi 2025		
		2023	2024	Target	Realisasi*	% capaian
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,091		81,75	82,584	101,0
	Predikat Akuntabilitas Kinerja (Nilai AKIP)	77,2	79,15	90,00 (AA)	79,15	87,9

\*Angka sementara

Untuk indikator pada sasaran ini lebih jelasnya dapat dilihat perbandingan realisasinya pada gambar 3.5 berikut :

**Gambar 3.5 Perbandingan realisasi tahun 2023-2025\***

Dapat dilihat pada gambar 3.5 baik Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi pada tahun 2023-2025 mengalami peningkatan.

Jika dilihat perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.17 Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik s.d Jangka Menengah Daerah**

No.	Indikator	Capaian Awal RPJMD 2021	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025	Target 2026	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,556		82,584	82	100,7
	Predikat Akuntabilitas Kinerja (Nilai AKIP)	75 (BB)	79,15 (BB)	79,15 (BB)	90,00 (AA)	83,3

Berdasarkan tabel 3.17 capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2025 jika dibandingkan dengan target Renstra di tahun 2026 telah tercapai sebesar 100,7% dan capaian Predikat Akuntabilitas Kinerja (Nilai AKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2025 jika dibandingkan dengan target di tahun 2026 telah tercapai 83,3%. Sumberdaya pendukung pencapaian kinerja sasaran ini adalah sumberdaya manusia dalam menyusun perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang baik.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini antara lain adalah konsistensi dalam melakukan koordinasi dengan unit kerja baik di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi,

Dinas Kabupaten/Kota, dan Instansi Pemerintah di Pemerintahan Provinsi Jambi. Dan faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini antara lain kurangnya anggaran untuk melakukan koordinasi. Alternatif solusi yang telah dilakukan selama tahun 2025 antara lain melakukan Rakortekrenbang dan evaluasi internal yang dilakukan secara berkala.

Pada indikator Indeks kepuasan Masyarakat berdasarkan hasil survey IKM, untuk kualitas pelayanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi masih dipersepsikan Baik oleh penggunanya. Hal ini terlihat dari hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 82,584 dan berada dalam mutu pelayanan B dengan kategori BAIK, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 76,61-88,30. Jika dibandingkan dengan IKM Provinsi Jambi, unsur pelayanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi sebesar 82,584 berada dibawah nilai IKM Provinsi Jambi sebesar 88,324. Hal ini menunjukkan kualitas pelayanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi berada sedikit dibawah rata-rata kualitas pelayanan semua OPD Provinsi Jambi.

Rencana Tindak Lanjut, Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.18 Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM**

No	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Perilaku petugas pelayanan	Peningkatan Tindak Lanjut	✓				Bagian Humas
		Meningkatkan SDM Petugas Pengaduan UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai				✓	Kasubbag TU UPTD PPP
2	Kecepatan Pelayanan	Lakukan Monitoring dan			✓	✓	Kasubbag Umum

		evaluasi terhadap prosedur kecepatan pelayanan					Keuangan dan Aset
3	Kesesuaian Pelayanan	Memberikan pelatihan khusus terkait <i>service excellent</i>		✓			Sekretaris

Sedangkan untuk indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja (Nilai AKIP) berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025, nomor : LAP.700/127/ITPROV-4/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2024 dilaksanakan evaluasi AKIP internal yang telah dilakukan oleh inspektorat yang merekomendasikan perbaikan terhadap 6 (enam) hal berikut:

- a. Dengan memperhatikan kriteria SMART realisasi capaian target kinerja harus terukur, selaras, dapat dicapai, dan menantang, sehingga target pada semua sasaran realisasi capaian kinerja terpenuhi;
- b. Pimpinan harus sepenuhnya terlibat sebagai pengambil Keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian kinerja dengan memperhatikan monitoring evaluasi, membuat SK tim evaluasi internal, Notulensi dan daftar hadir yang ditandatangani oleh pimpinan Perangkat Daerah;
- c. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala dengan menentukan jadwal, notulensi, daftar hadir dan dokumentasi pengukuran kinerja triwulan;
- d. Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja dengan menampilkan factor hambatan dan Solusi pada laporan monev triwulan;
- e. Penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja agar memaksimalkan capaian kinerja dan meminimalkan anggaran sehingga efisiensi anggaran dapat tercapai sesuai target kinerja dengan rencana dan realisasi anggaran yang digunakan; dan
- f. Menggunakan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan perencanaan kinerja dan mengambil Langkah konkrit terkait informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja.

Pada tahun 2025 ini keenam rekomendasi ini menjadi bahan evaluasi perbaikan yang akan meningkatkan kualitas serta nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi sehingga di tahun 2025 telah dilaksanakan tindak lanjut atas keenam rekomendasi antara lain target kinerja sudah memperhatikan kriteria SMART dan telah diimplementasikan dalam Menyusun Renstra 2025-2029, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan juga telah sepenuhnya terlibat sebagai pengambil Keputusan, Pengukuran Kinerja juga telah dilakukan secara berkala dan mempengaruhi penyesuaian strategi, penggunaan anggaran juga telah diupayakan agar dapat memaksimalkan pencapaian kinerja, dan hasil evaluasi internal juga telah digunakan dalam rangka perbaikan kinerja.

### **3.2 Realisasi Anggaran**

Penyerapan anggaran yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025 sebesar 93,85% atau sebesar Rp 25.916.225.479,- (dua puluh lima milyar Sembilan ratus enam belas juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) dari anggaran sebesar Rp 27.615.646.832,- (dua puluh tujuh milyar enam ratus lima belas juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025 terealisasi secara efisien.

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.18 Anggaran dan Realisasi Per Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi*	% Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan (ton)	118.300,5	96.819,2	81,8	3.397.969.944	3.358.093.430	98,8
2	Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha)	5.833,19			847.905.200	832.310.600	98,2
		Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	75%	66,87%	89,2	391.430.100	387.591.500	99,0
3	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	42,00	41,8	99,5	672.561.220	658.729.610	97,9
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,75	82,584	101,0	22.305.780.368	20.679.500.339	92,7
		Predikat Akuntabilitas Kinerja (Nilai AKIP)	AA (90,00)	BB (79,15)	87,9			

\*Angka Sementara

Analisis efisiensi ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.19 Analisis Efisiensi Anggaran**

Sasaran	Indikator Kinerja Program	Capaian Output*	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	AA x COP	(AA X COP) - RA	Efisiensi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(2)	(6)=(5)-(4)	(7)=(6)÷(3)
Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan (ton)	81,8	3.397.969.944	3.358.093.430	2.779.539.414	274.595.847.989	80,81
Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha)	0	847.905.200	832.310.600		832.310.600	(0,98)
	Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	89,2	391.430.100	387.591.500	387.591.500	34.527.973..420	88,21
Meningkatnya angka konsumsi ikan	Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	99,5	672.561.220	658.729.610	658.198.414	66.261.111.780	98,52
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	101,0	22.305.780.368	20.679.500.339	2.106.780.955.758	2.086.101.455.419	93,52
	Predikat Akuntabilitas Kinerja (Nilai AKIP)	87,9					

\*Angka Sementara

### **Analisis Efisiensi**

Berdasarkan tabel 3.19 diatas, pada sasaran meningkatnya produksi perikanan, dengan indikator jumlah produksi perikanan tercapai sebesar 81,85% dengan capaian realisasi keuangan sebesar 98,8% dari total alokasi anggaran sebesar Rp 3.397.969.944,- (tiga milyar tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah) dengan tingkat efisiensi 80,81. Pencapaian sasaran ini didukung oleh 2 (dua) program yaitu Program Pengelolaan Perikanan Tangkap yang berkontribusi sebanyak 48,4% produksi dari total produksi perikanan dan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya yang berkontribusi sebanyak 51,6% produksi dari total produksi perikanan. Sedangkan sasaran meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan dengan 2 (dua) indikator yaitu: 1) Kawasan konservasi yang dikelola berkelanjutan (ha) tercapai sebesar ... dengan capaian realisasi keuangan sebesar 98,2% dan tingkat efisiensi sebesar ... yang pencapaian indikator ini didukung oleh Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau kecil; dan 2) Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan tercapai sebesar 0% dengan capaian realisasi keuangan sebesar 99,0% dan Tingkat efisiensi 88,21 yang pencapaian indikator ini didukung oleh Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Untuk sasaran meningkatnya angka konsumsi ikan dengan indikator Angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) tercapai sebesar 99,5% dengan capaian realisasi keuangan 97,9% dan Tingkat efisiensi sebesar 98,52 yang pencapaiannya didukung Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Pada sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik dengan 2 (dua) indikator yaitu indikator pertama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang tercapai 101% dan indikator kedua kedua Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP) dengan capaian 87,9%. Kedua indikator ini didukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi yang capaian realisasi keuangannya sebesar 92,7% dan Tingkat efisiensi sebesar 93,52.

Adapun terkait penyerapan anggaran yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025 sebesar 93,85% atau sebesar Rp 25.916.225.479,- (dua puluh lima milyar Sembilan ratus enam belas juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) dari anggaran sebesar Rp 27.615.646.832,- (dua puluh tujuh milyar enam ratus lima belas juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua), sumbangsih anggaran yang tidak terealisasi yang paling signifikan berasal dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

khususnya kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan sisa anggaran sebesar 5,2% dari total anggaran yang tersedia di tahun 2025. Adapun tindak lanjut yang telah dilakukan adalah dalam melakukan penganggaran pada kegiatan ini untuk tahun 2026 telah dilakukan evaluasi dan efisiensi pada penganggaran kegiatan ini di tahun 2026 agar di tahun 2026 anggaran pada kegiatan ini dapat terealisasi secara efektif dan efisien.

## IV. PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis sasaran perangkat daerah, dengan indikator :
  - a. Untuk sasaran Meningkatnya produksi perikanan capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi pada Tahun 2025 adalah sebesar 81,8%.
  - b. Sasaran meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan, terdapat 2 (dua) indikator sasaran yaitu: 1) Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha) capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi pada tahun 2025 adalah sebesar 0,00%; dan 2) Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi pada tahun 2025 adalah sebesar 89,2%.
  - c. Sasaran meningkatnya angka konsumsi ikan, dengan indikatornya Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun), capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025 adalah sebesar 99,5%.
  - d. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik, dengan 2 (dua) indikatornya yaitu: 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) capaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi pada tahun 2025 adalah 101,0%; dan 2) Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2025 adalah sebesar 87,9%
2. Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja, seperti masih terbatasnya kualitas dan jumlah sumberdaya manusia dan yang paling utama adalah minimnya anggaran, sehingga hal ini sangat

mempengaruhi pencapaian kinerja. Guna mengantisipasi permasalahan yang ada perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Selalu konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, juga dengan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota, serta instansi pemerintah lainnya maupun pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan bidang kelautan dan perikanan.
- b. Meningkatkan kinerja pengelolaan program dan kegiatan dengan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran stratejik yang ditetapkan. Hal ini secara khusus akan difokuskan pada sasaran-sasaran stratejik yang capaian kinerjanya masih berada di bawah target yang ditetapkan.
- c. Memaksimalkan bantuan kapal > 30 GT dari pemerintah pusat sehingga wilayah tangkapan nelayan dapat menjangkau daerah yang lebih luas, serta memberikan bantuan alat penangkapan ikan bagi nelayan.
- d. Diperlukan rekrutmen tenaga teknis baru yang berpendidikan teknis perikanan. Selain itu telah diupayakan untuk memberikan kesempatan berlatih dan magang kepada aparat yang ada.
- e. Melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih berkualitas, melalui pendekatan 4 (empat) pilar *Balance Score Card (BSC)* yang meliputi pendekatan *customer perspective, internal process, financial perspective, dan learning and growth perspective*.
- f. Memperhatikan kriteria SMART dalam realisasi capaian target kinerja yang terukur, selaras, dapat dicapai, dan menantang.

Laporan Kinerja Tahun 2025 merupakan laporan yang telah selesai disusun dan masih memerlukan penyempurnaan terutama dalam menganalisis kinerja organisasi. Oleh karena itu, masukan-masukan yang konstruktif sangat diperlukan bagi penyempurnaan dan pengembangan dimasa mendatang.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1

## Matriks Renstra 2021-2026 (Tujuan dan Sasaran)

**BAB.IV.**  
**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi telah menetapkan Rencana Tujuan dan Sasaran untuk Tahun 2021-2026 yang dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1. Rencana Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 setelah Perubahan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja pada Tahun ke				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,65	79,85	80,35	81,75	82,00
			2. Predikat Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	75 (BB)	80 (A)	85 (A)	90 (AA)	95 (AA)
2	Meningkatkan produksi perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	3. Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	111.648,9	113.804,8	116.021,7	118.300,3	120.643,9
3	Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.	Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	4. Jumlah Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha)	10.687,49 Ha	16.400,53 Ha	11.213,36	5.833,19	5.696,36
			5. Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	60%	65%	70%	75%	77%
4	Meningkatkan angka konsumsi ikan	Meningkatnya angka konsumsi ikan	6. Nilai Angka Konsumsi Ikan (AKI) Daerah (Kg/Kapita/Tahun)	40,60	41,00	41,50	42,00	42,50

#### 4.1. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi yang akan diimplementasikan dalam tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dan tangkap optimal,
3. Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan,
4. Meningkatkan angka konsumsi ikan.

## Matriks Renstra 2025-2029 (Tujuan dan Sasaran)

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (Tahun 2024)	2025	Target Kinerja pada Tahun					Kondisi Akhir
							2026	2027	2028	2029	2030	
1	Terwujudnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Nilai)	Sasaran	Indikator Sasaran	99,32	100,26	101,85	102,15	102,92	103,45	103,89	103,89
				Indikator Sasaran	101,94	102,15	102,38	103,75	103,98	104,25	104,65	104,65
			Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Produktivitas Perikanan Tangkap (Ton/Alat Tangkap/Tahun)	169,15	169,66	170,16	170,67	171,18	171,70	172,21	172,21
				Produktivitas Perikanan Budidaya (Ton/Ha/Tahun)	89,85	92,28	92,54	96,24	100,09	105,09	110,35	110,35

## Lampiran 2

### Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (awal)

3/4/25, 11:52 AM

Laporan Perjanjian Kinerja



Provinsi Jambi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : ASRAF, S.PT. M.SI**  
**Jabatan : KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

**Nama : DR. H. AL HARIS, S.SOS, M.H**  
**Jabatan : GUBERNUR JAMBI**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selanjutnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 4 Februari 2025

**Pihak Kedua**

**Pihak Pertama**




GUBERNUR JAMBI

Dr. H. AL HARIS, S.Sos. M.H

ASRAF, S.PT./M.SI

PEMBAHUTAMA MADYA (IV/D)

NIP. 196612011994031006

[https://paket.jambiprov.go.id/atgov-api/renstra\\_laporan/perjanjian\\_kinerja\\_jambi?mode=html&encouz=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9...](https://paket.jambiprov.go.id/atgov-api/renstra_laporan/perjanjian_kinerja_jambi?mode=html&encouz=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9...)

1/2

3/4/25, 11:52 AM

Laporan Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah produksi Perikanan	118300.5 Ton
2	Meningkatnya Kelestarian Sumber daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Pesisir, Ruang Laut dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola Secara Berkelanjutan	75 Persen
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.75 Nilai
		Nilai SAKIP	90 Nilai
4	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Nilai Angka Konsumsi Ikan (AKI) Daerah	42 kg/kapita/tahun

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	720.528.750	
2	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	882.468.000	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.998.079.980	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.564.802.500	
5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.014.629.900	
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.815.634.380	

Jambi, 4 Februari 2025

  
 GUBERNUR JAMBI  
 Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H

  
 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 ASRAF S.P.T. M.Si

[https://paket.jambiprov.go.id/atgov-api/renstra\\_laporan/perjanjian\\_kinerja\\_jambi?mode=html&encloz=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9...](https://paket.jambiprov.go.id/atgov-api/renstra_laporan/perjanjian_kinerja_jambi?mode=html&encloz=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9...)

2/2



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Nilai)	100,26
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) (Nilai)	102,15

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 22.225.745.168,-	APBD
2. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp 847.905.200,-	APBD
3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 1.820.813.994,-	APBD
4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 1.467.155.950,-	APBD
5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp 296.465.300,-	APBD
6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 672.561.220,-	APBD

  
 GUBERNUR JAMBI  
 Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H

Kepala Dinas,  
  
**ASRAF, S.Pt, M.Si**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19661120 199403 1 006

Lampiran 3

Matriks Pengukuran Kinerja

MATRIKS PENGUKURAN KINERJA DAN RECAPITULASI PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

NO	Kode	Unsubandingan urusan pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome)/kegiatan (output)	Jumlah Pagu Anggaran (Rp)	Target Anggaran	Realisasi Keuangan		Target Kinerja Per tahun		Realisasi Capaian Kinerja		Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut	Keterangan
						2025	%	Jumlah	%	2025	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat Akumulabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	22.305.780.368	22.305.780.368	20.679.900.339	92,71	A (90,00)	Indeks	-	100	Evaluasi AKIP tahun 2025 akan dilaksanakan triwulan II tahun 2025		capaian Nilai AKIP tahun 2024 adalah 92,71% dan target tahun tercapai 92,9% dibanding target Tahun 2025
1		Kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tindak lanjut atas Evaluasi Kinerja	319.171.710	319.171.710	313.504.100	98,22	2	Laporan	2	100			
		1. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	99.073.100	99.073.100	97.957.300	98,48	3	Dokumen	3	100			
		2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Misisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan kinerja dan Misisar Realisasi realisasi kinerja SKPD	62.391.460	62.391.460	61.957.700	99,30	10	Laporan	10	100			
		3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	157.707.150	157.707.150	153.979.100	97,64	1	Laporan	1	100			
2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terkeola administrasi umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan	20.854.540.174	20.854.540.174	19.338.213.179	92,73	12	Bulan	12	100			
		1. Sub Kegiatan Pemediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20.588.461.774	20.588.461.774	19.142.614.179	92,98	156	Orang/Bulan	156	100			
		2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	266.078.400	266.078.400	195.599.000	73,51	1	Dokumen	1	100			
3		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan Barang Milik Daerah	84.554.400	84.554.400	83.571.450	98,84	2	Laporan	2	100			
		1. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	84.554.400	84.554.400	83.571.450	98,84	2	Laporan	2	100			
4		Kegiatan Administrasi Perawatan Perangkat Daerah	Terlaksananya Diupin ASN Dinas Kelautan dan Perikanan	85.335.800	85.335.800	82.232.750	96,34	1	Tahun	1	100			
		1. Sub Kegiatan Perbaikan dan Pelebaran Perangkat Daerah	Jumlah pegawai melaksanakan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.000.000	6.000.000	3.520.000	58,67	10	Orang	8	80	Adanya efisiensi anggaran, maka jumlah pegawai yang mengikuti diklat berkurang/target berubah serta tidak adanya pendidikan & pelatihan yang akan diikuti		

NO	Kode	Usuan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output)	Jumlah Pagu Anggaran (Rp)	Target Anggaran	Realisasi Keuangan		Target Kinerja Pertahun		Realisasi Capaian Kinerja		Rencana Tindak Lanjut	Keterangan	
						2025	2025	Jumlah	Satuan	2025	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	79.355.850	79.355.850	78.712.750	98,19	40	Orang	40	100			
		<b>Kegiatan Administrasi Umum pada dinas kelautan dan perikanan</b>		<b>189.920.615</b>	<b>189.920.615</b>	<b>186.120.210</b>	<b>98,00</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>100,00</b>			
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	21.533.590	21.533.590	21.420.860	99,48	5	Paket	5	100			
		2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6.827.125	6.827.125	6.307.000	92,38	2	Paket	2	100			
		3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	34.559.900	34.559.900	34.559.900	100,00	2	Paket	2	100			
		4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2.000.000	2.000.000	1.000.000	50,00	1	Dokumen	1	100			
		5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	125.000.000	125.000.000	122.832.450	98,27	12	Laporan	12	100			
		<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terkelolanya administrasi umum pada dinas kelautan dan perikanan</b>	<b>11.196.000</b>	<b>11.196.000</b>	<b>11.100.000</b>	<b>98,14</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>100</b>			
		1. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	11.196.000	11.196.000	11.100.000	98,14	10	Unit	10	100			
		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terkelolanya administrasi umum pada dinas kelautan dan perikanan</b>	<b>534.108.119</b>	<b>534.108.119</b>	<b>509.452.150</b>	<b>95,38</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>100,0</b>			
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	1	Laporan	1	100			
		2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	533.108.119	533.108.119	508.452.150	95,38	4	Laporan	4	100			

NO	Kode	Usus/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator kinerja program (outcome/ kegiatan) (output)	Jumlah Pagu Anggaran (Rp)	Target Anggaran	Realisasi Keuangan		Target Kinerja Per tahun			Realisasi Capaian Kinerja		Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut	Keterangan
						2025	%	Jumlah	Satuan	2025	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Perorangan atau Lapangan Operasional atau Lapangan 3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terdapatnya administrasi umum pada dinas kelautan dan perikanan	226.833.500	226.833.500	145.306.600	64,44	12	Bulan	11	12	100			
			Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan perorangan dan dibayarkan pajaknya	79.133.700	79.133.700	76.556.600	99,27	59	Unit	59	100				
			Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	71.280.500	71.280.500	68.159.900	97,02	4	Unit	4	100				
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	76.519.300	76.519.300	7.590.000	9,92	20	Unit	20	100				
II		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU RECIL	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Dengan Rencana Tata Ruang Yang Diberikan	847.905.200	847.905.200	832.310.600	98,16	2	Rekomendasi		0,00		Belum adanya kesedaran masyarakat untuk mengurus permohonan izin pemanfaatan ruang yang menyakrat untuk ganti rugi alat tangkap nelayan	Tim Pokja Tata Ruang menyurat masing-masing kecamatan untuk memantapkan ruang laut	
			Jumlah Kawasan Konservasi yang Diteapkan					3	Kawasan		0,00		Tidak tersedianya anggaran dalam rangka penetapan Kawasan Konservasi	Teah dilaksanakan FGD Kecamatan Sempu, Kecamatan Sosial Ekowati di KKPD 04 Seberang Kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan luas 2.570,24 Perda Tahun 2024	
1		Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase wilayah penairan yang dikelola berdasarkan RZWP3K	847.905.200	847.905.200	832.310.600	98,16	90	%		0,00		Anggaran pelaksanaan konsultasi publik dan konsultasi teknis tidak tersedia, sehingga usulan penetapan kawasan konservasi tidak bisa dilakukan	Keersediaan anggaran agar kegiatan konservasi dapat berjalan untuk Pelabuhan Ujung Jabung masih dalam tahapan hibah dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat	

NO	Kode	Unsubandingan urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output)	Jumlah Pagu Anggaran (Rp)	Target Anggaran	Realisasi Keuangan		Target Kinerja Per tahun		Realisasi Capaian Kinerja		Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut	Keerangan
						2025	2025	Jumlah	Satuan	2025	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1. Sub Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terdistribusi	Luasan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdistribusi	643.727.200	643.727.200	630.070.000	97,88	11.213,36	Ha	-	0,00	Tidak tersedianya anggaran dalam rangka penetapan Kawasan Konservasi	Luas Kawasan Konservasi Pesisir di Provinsi Jambi sebesar 11.213,36 Ha, telah selesai dokumen awal untuk menjadi bahan konsultasi publik	
		2. Sub Kegiatan Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah menerima informasi terkait mitigasi bencana melalui program mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	204.178.000	204.178.000	202.240.600	99,05	60	Orang		0,00	Anggaran telah diefisieni	Koordinasi antara Bapropda dan Baprosda Kabupaten/Kota untuk menghasilkan output dan outcome tercapai	
III		<b>PROGRAM PENGUJULAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Tangkap</b>	<b>1.930.813.994</b>	<b>1.930.813.994</b>	<b>1.907.125.700</b>	<b>98,77</b>	<b>55.467,5</b>	<b>Ton</b>	<b>46.829,2</b>	<b>84,4</b>			
1		<b>Kegiatan Pengelolaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap</b>	<b>Meningkatnya produksi perikanan tangkap di laut</b>	<b>1.243.275.500</b>	<b>1.243.275.500</b>	<b>1.238.626.800</b>	<b>99,64</b>	<b>49.755,0</b>	<b>Ton</b>	<b>42.145,9</b>	<b>84,7</b>			
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah laut sampai dengan 12 mil	1.243.275.500	1.243.626.800	1.238.626.800	99,64	3.000	Unit	1.436	47,9	Adanya efisiensi anggaran membuat target tidak tercapai		
2		<b>Kegiatan Pengelolaan Pengkayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Rempak, Rawa dan Perairan Lainnya yang dapat Diusahakan Lines Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah produksi perikanan tangkap di PUD</b>	<b>444.129.300</b>	<b>444.129.300</b>	<b>439.057.700</b>	<b>98,86</b>	<b>5.712,5</b>	<b>Ton</b>	<b>4.683,3</b>	<b>82,0</b>	<b>Sumberdaya ikan di perairan umum berkurang, dampak dari pencemaran lingkungan</b>		
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah perairan darat	444.129.300	444.129.300	439.057.700	98,86	400	Unit	38	9,50	Adanya efisiensi anggaran membuat target tidak tercapai		
3		<b>Kegiatan Pemetaan Lokasi Pembangunan sers Perikanan Provinsi</b>	<b>Jumlah kapal yang berubah di pekabuhan perikanan</b>	<b>243.409.194</b>	<b>243.409.194</b>	<b>229.241.200</b>	<b>94,18</b>	<b>4.340</b>	<b>Kapal</b>	<b>5.374</b>	<b>123,82</b>			
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelembuhan Perikanan	Jumlah sarana dan prasarana pekabuhan perikanan yang tersedia	-	-	-	#DIV/0!	1	Unit			0,00	Efisiensi anggaran, anggaran dihapus	
		2. Sub Kegiatan Pelembuhan Perikanan dan Pengusahaan Pelembuhan	Fungsi permesinan dan permesinan pekabuhan perikanan yang terlaksana	243.409.194	243.409.194	229.241.200	94,18	2	Layanan	1	50,00	Kendali desking kapal rusak berat, sehingga tidak bisa beroperasi dan pelayanan		

NO	Kode	Unsur/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output)	Jumlah Pagu Anggaran (Rp)	Target Anggaran	Realisasi Keuangan		Target Kinerja Per tahun		Realisasi Capaian Kinerja			Rencana Tindak Lanjut	Keterangan
						2025	%	Jumlah	Satuan	2025	%	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IV		<b>PROGRAM PENGOLAHAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>1.467.165.930</b>	<b>1.467.165.930</b>	<b>1.450.967.720</b>	<b>98,90</b>	<b>62.833,0</b>	<b>Ton</b>	<b>43.990,0</b>	<b>79,86</b>			
1		<b>Kegiatan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>	<b>Terlaksananya penyediaan dan pengelolaan pembudidayaan ikan di laut</b>	<b>135.112.400</b>	<b>135.112.400</b>	<b>132.666.200</b>	<b>98,19</b>	<b>1</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>			
		1. Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan ikan dan lingkungan budidaya di Laut dan Ultras daerah	Jumlah sarana dan prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia	135.112.400	135.112.400	132.666.200	98,19	2	Unit	2	100,00			
2		<b>Kegiatan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</b>	<b>Terlaksananya penyediaan dan pengelolaan pembudidayaan ikan di darat</b>	<b>1.332.043.530</b>	<b>1.332.043.530</b>	<b>1.318.301.530</b>	<b>98,97</b>	<b>2</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>2</b>	<b>100,00</b>			
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Air Payau dan Air Tawar Ultras Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar Ultras daerah Kabupaten/Kota	273.383.300	273.383.300	268.490.700	98,21	9	Unit	9	100,00			
		2. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Ultras Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar Ultras daerah Kabupaten/Kota	1.058.660.230	1.058.660.230	1.049.810.830	99,16	100	Unit	100	100,00			
V		<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>Persentase unit usaha perikanan yang tat terhadap peraturan perundang-undangan</b>	<b>391.430.100</b>	<b>391.430.100</b>	<b>380.091.500</b>	<b>97,10</b>	<b>75</b>	<b>%</b>	<b>66,87</b>	<b>85,16</b>		<b>Diadakan pelatihan dan pendidikan untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)</b>	
		<b>Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai Dengan 12 Mil</b>	<b>Peningkatan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan</b>	<b>383.930.100</b>	<b>383.930.100</b>	<b>380.091.500</b>	<b>99,00</b>	<b>68</b>	<b>%</b>	<b>68,00</b>	<b>100,00</b>			
1		<b>Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai Dengan 12 Mil</b>	<b>Persentase pelaku usaha perikanan yang terawasi</b>	<b>383.930.100</b>	<b>383.930.100</b>	<b>380.091.500</b>	<b>99,00</b>	<b>2</b>	<b>Pelaku Usaha</b>	<b>2</b>	<b>100,00</b>			
		1. Sub Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai Dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan Provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan Provinsi	383.930.100	383.930.100	380.091.500	99,00	2	Pelaku Usaha	2	100,00			
2		<b>Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Strategis, Cenuk, dan Perikanan Air Limbah yang Dapat Disusahkan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan umum daratan</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>82</b>	<b>%</b>	<b>82,00</b>	<b>100,00</b>			

NO	Kode	Uraian/teknis unasan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/kegiatan) (output)	Jumlah Pagu Anggaran (Rp)	Target Anggaran	Realisasi Keuangan		Target Kinerja Perchub		Realisasi Capaian Kinerja			Rencana Tindak Lanjut	Keterangan
						2025	%	Jumlah	Satuan	2025	%	11		
1	2	1. Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Pengolahan Ikan dan/atau Usaha Pengolahan Hasil Perikanan di Wilayah Perbatasan Wuduk, Ewas dan Geronting Ati Lainnya Sesuai Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaku usaha pengolahan ikan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan yang terdapat di wilayah perbatasan Wuduk, Ewas dan Geronting Ati Lainnya Sesuai Kewenangan Provinsi	7.500.000	7.500.000	7.500.000	100,00	9	10	3	100,00			
		<b>PROGRAM PERICOLOAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Angka konsumsi ikan</b>	<b>672.961.220</b>	<b>672.961.220</b>	<b>688.729.810</b>	<b>97,94</b>	<b>42.00</b>	<b>Kg/Kapita/tahun</b>	<b>41,90</b>	<b>98,92</b>	<b>Capaian/realisasi AKI 2024 untuk AKI tahun 2023 di hitung pada tahun 2028</b>	<b>14</b>	<b>Capaian ini merupakan capaian tahun sebelumnya</b>
1		<b>Kegiatan Penneblian Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Terbitnya jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan</b>	<b>324.845.400</b>	<b>324.845.400</b>	<b>320.198.000</b>	<b>98,57</b>	<b>4</b>	<b>Izin</b>	<b>4</b>	<b>100,00</b>			
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah data dan informasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	324.845.400	324.845.400	320.198.000	98,57	3	Dokumen	3	100,00			
2		<b>Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Perikanan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>	<b>Jumlah UPI yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan</b>	<b>197.537.440</b>	<b>197.537.440</b>	<b>191.314.500</b>	<b>96,85</b>	<b>9</b>	<b>Kelompok</b>	<b>8</b>	<b>86,89</b>	<b>Terjadinya penghematan anggaran</b>	<b>Penambahan anggaran</b>	
		1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitas, dan Kelembagaan Usaha Perikanan dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Hasil Perikanan dalam rangka Meningkatkan Produk yang Berkualitas, Meningkatkan Daya Saing, dan Berdaya Saing	Jumlah unit usaha yang diberikan pembinaan, fasilitas, pemantauan dan/atau pembinaan terhadap keamanan hasil perikanan, dan daya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka meningkatkan mutu, kualitas, dan daya saing produk perikanan, dan berdaya saing	110.814.800	110.814.800	107.548.600	97,05	13	Unit Usaha	10	76,92	Terjadinya penghematan anggaran	Penambahan anggaran	
		2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitas, dan Kelembagaan Usaha Perikanan dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Hasil Perikanan dalam rangka Meningkatkan Produk yang Berkualitas, Meningkatkan Daya Saing, dan Berdaya Saing	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	86.722.640	86.722.640	83.705.900	96,59	13	Unit Usaha	10	76,92	Terjadinya penghematan anggaran	Penambahan anggaran	

NO	Kode	Unsubbidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output)	Jumlah Pagu Anggaran (Rp)	Target Anggaran	Realisasi Keuangan		Target Kinerja Per tahun		Realisasi Capaian Kinerja		Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut	Keerangan
						2025	%	Jumlah	Satuan	2025	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3		Kegiatan Penyediaan dan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Sisa Pertambangan dan Hasil Bumi Lainnya Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Informasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	150.178.380	150.178.380	147.217.110	98,03	1	Dokumen	10	100,00			
		1. Sub Kegiatan Pemberian Insentif dan Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Darat Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah unit usaha perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberikan insentif dan fasilitas	150.178.380	150.178.380	147.217.110	98,03	10	Unit Usaha	10	100,00			
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>				<b>27.616.646.832</b>										

## Lampiran 4

### Tanggapan/Tindak Lanjut Hasil Evaluasi LKJIP Tahun 2024


Tanggapan/Tindak Lanjut Hasil Evaluasi LKJIP Tahun 2024

OBJEK EVALUASI : Laporan Kinerja Tahun 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi

No	Uraian Evaluasi	Tanggapan/Tindak Lanjut	Keterangan
1	Perbaiki Margin Tabel dalam Penulisan	Seluruh margin table dalam penulisan telah diperbaiki	Sudah Selesai
2	Tambahkan Rencana tindak lanjut dari target yang tidak tercapai dalam bentuk narasi	Rencana tindak lanjut dari target yang tidak tercapai telah di narasikan	Sudah Selesai
3	Analisis Efisiensi lebih mendalam	Analisis efisiensi dan efektifitas terhadap penggunaan anggaran yang dilihat dari realisasi anggaran yang terserap dibandingkan dengan kinerja yang dicapai sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja telah dicantumkan	Sudah Selesai
4	Tambahkan tindak lanjut dari hasil evaluasi SAKIP Inspektorat tahun 2023	Tindak lanjut dan perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan perangkat daerah sebagai tindak lanjut rekomendasi dalam hasil Evaluasi SAKIP internal yang telah dilakukan oleh APIP/Inspektorat telah di narasikan dan ditambahkan	Sudah Selesai

Jambi, Januari 2025





# LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

- Perbaiki Margin tabung dalam penerapan
- Tambahkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang tidak tercapai (KURANG)
- Analisis Efisiensi (lebih mendalam)
- Jelaskan ~~Rencana~~ Lampaian dari hasil evaluasi Satep Inspektoral tahun 2023.

*M* 23/01/25

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI JAMBI**



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal A. Yani No. 1 Telanaipura, Jambi  
 Telp. (0741) 60144, Fax. (0741) 60400, Website : www.jambiprov.go.id

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Senin, 17 Maret 2025, waktu pukul 08.00 WIB s.d. selesai bertempat di Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi serta berdasarkan Surat Undangan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor S-005/ /SETDA-ORG.2.2/III/2025 tanggal 11 Maret 2025, kami masing-masing :

1. Nama : *Suparno*  
 NIP : *197109091997031005*  
 Pangkat/Gol : *Penata Tk. 2 (III/c)*  
 Jabatan : Kasubbag Perencanaan/Program Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi

yang selanjutnya disebut pihak Pertama,

2. Nama : Fadli Saputra., S.E., M.M.  
 NIP : 19850722 201101 1 002  
 Pangkat : Penata / III.c  
 Jabatan : Analis Akuntabilitas Kinerja Apartur pada Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi

selanjutnya disebut pihak Kedua, telah melaksanakan reuiu terhadap Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dan tidak ditemukan kekeliruan, selanjutnya *soft copy* LKj segera di unggah ke dalam laman <https://esr.menpan.go.id/> guna bahan Evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Jambi.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 17 Maret 2025

Pihak Kedua,  
 Analis Akuntabilitas Kinerja Apartur

*[Signature]*  
 FADLI SAPUTRA, S.E., M.M.  
 NIP. 19850722 201101 1 002  
 Penata / III.c

Pihak Pertama,  
 Kasubbag Perencanaan/Program

*[Signature]*  
*Suparno.*  
 NIP. *197109091997031005*

Mengetahui,

a.n. Kepala Biro Organisasi  
 Kabag Reformasi Birokrasi dan  
 Akuntabilitas Kinerja

*[Signature]*  
 ISMAIL, S.E.  
 NIP. 19740217 199803 1 001  
 Pembina / IV.a

Lampiran 5

Penghargaan yang diterima



# **DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI**



**JL. MT HARYONO NO.09 TELANAIPURA-JAMBI**